

**FORMULASI HUKUM PENCEGAHAN PERKAWINAN PAKSA
MELALUI PERADILAN AGAMA**

DISERTASI

Oleh:

**AHMAD RASYIDI HALIM
NIM. 200311020081**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI S3 ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
2024**

FORMULASI HUKUM PENCEGAHAN PERKAWINAN PAKSA MELALUI PERADILAN AGAMA

DISERTASI

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor
Program Studi S3 Ilmu Syariah

Oleh:

**AHMAD RASYIDI HALIM
NIM. 200311020081**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI S3 ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rasyidi Halim
Tempat/Tanggal lahir : Buntok, 30 Desember 1993
NIM : 200311020081
Program Studi : S3 Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi saya yang berjudul: “**Formulasi Hukum Pencegahan Perkawinan Paksa melalui Peradilan Agama**” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, Februari 2024
Yang membuat pernyataan,



Ahmad Rasyidi Halim

Halaman Persetujuan
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA PROGRAM DOKTOR

**Formulasi Hukum Pencegahan Perkawinan Paksa
Melalui Peradilan Agama**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Ahmad Rasyidi Halim

NIM. 200311020081

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk
Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji**

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.
Tanggal : 26 Februari 2024

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
Tanggal : 26 Februari 2024

PENGESAHAN DISERTASI




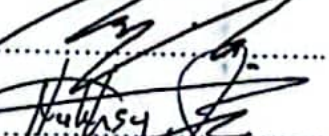



FORMULASI HUKUM PENCEGAHAN PERKAWINAN PAKSA MELALUI PERADILAN AGAMA

Disusun dan dipersembahkan oleh:

Ahmad Rasyidi Halim
NIM. 200311020081

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2024

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd. (Ketua/Penguji)	1. 
2. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. (Penguji Utama)	2. 
3. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Penguji)	3. 
4. Prof. Alfitri, M.Ag., LL.M., Ph.D. (Penguji Eksternal)	4. 
5. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. (Penguji)	5. 
6. Mujiburohman, M.A., Ph.D. (Penguji)	6. 
7. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A. (Sekretaris Penguji)	7. 

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



ABSTRAK

Ahmad Rasyidi Halim, NIM. 200311020081, *Formulasi Hukum Pencegahan Perkawinan Paksa melalui Peradilan Agama*, Pembimbing I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum., Pembimbing II: Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., Disertasi, Program Studi S3 Ilmu Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: *Formulasi Hukum, Pencegahan, Perkawinan Paksa, Peradilan Agama*

Ada dua problematika utama yang diteliti dalam penelitian ini. *Pertama*, problematika sosiologis berkaitan masih maraknya praktik perkawinan paksa dan perkawinan melalui perjodohan tanpa dasar cinta yang berujung gugatan perceraian ke pengadilan agama. *Kedua*, problematika yuridis mengenai belum diaturnya kewenangan peradilan agama dalam menangani perkara pencegahan perkawinan paksa melalui putusan tentang wali *mujbir* di peradilan agama.

Beranjak dari latar belakang tersebut, berikut akan dipaparkan rumusan permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana konsep formulasi hukum pencegahan perkawinan paksa melalui putusan tentang wali *mujbir* di peradilan agama; (2) Bagaimana formulasi prosedur hukum dalam mengadili perkara pencegahan perkawinan paksa melalui putusan tentang wali *mujbir* di peradilan agama; (3) Bagaimana relevansi pencegahan perkawinan paksa melalui peradilan agama berkaitan dengan *maqāsid* syariah, *maqāsid al-usrah*, perlindungan perempuan dan anak serta hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab berbagai rumusan masalah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian diuraikan secara deskriptif dan dianalisis secara deduktif. Data yang diteliti berupa data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *grand theory* (teori makro), *middle theory* (teori meso) dan *applied theory* (teori mikro).

Hasil penelitian ini: (1) Disertasi ini bertujuan untuk merumuskan norma hukum baru mengenai pencegahan perkawinan paksa yang bisa diinisiasi oleh anak atau pihak yang berada di bawah perwalian. Dalam penelitian ini diperoleh temuan baru dalam hukum materiil Undang-Undang Peradilan Agama di bidang pencegahan perkawinan, sehingga peradilan agama juga berwenang menangani perkara pencegahan perkawinan paksa. Konsep yang digagas berupa formulasi hukum pencegahan perkawinan paksa di peradilan agama melalui perluasan kewenangan peradilan agama dari semula hanya berwenang menangani perkara pencegahan perkawinan, sehingga kewenangan peradilan agama dalam Pasal 49 huruf a penjelasan angka 4 Undang-Undang Peradilan Agama, diperluas menjadi berwenang menangani perkara pencegahan perkawinan dan perkara pencegahan perkawinan paksa. Konstruksi landasan hukum pencegahan perkawinan paksa

melalui peradilan agama merujuk pada ketentuan hukum Islam dan hukum nasional. Selanjutnya, digagas teori hukum baru berupa teori hukum akomodatif peradilan agama; (2) Diperoleh temuan baru dalam hukum formil melalui gagasan pengembangan pemeriksaan dan putusan perkara pencegahan perkawinan paksa di peradilan agama. Langkah utama melalui optimalisasi mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator peradilan agama. Kemudian, digagas pengembangan hukum dalam pemeriksaan perkara pencegahan perkawinan paksa di peradilan agama dengan mendengar keterangan pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuannya, untuk didengar keterangannya seputar aturan perkawinan dan pencegahan perkawinan paksa serta untuk memberikan informasi formal bahwa telah terjadi percobaan perkawinan paksa yang dilakukan orang tua atau wali terhadap anak atau pihak yang berada di bawah perwalian. Selanjutnya, dalam putusan digagas *diktum* yang bersifat *konstitutur* (menimbulkan hukum baru) dengan menetapkan pihak orang tua atau wali jika terbukti melakukan pemaksaan, maka ditetapkan sebagai wali *mujbir* yang menyalahgunakan wewenang hak *ijbār*. Kemudian, juga digagas *diktum* yang bersifat *komdemnator* (perintah untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu) dengan melarang wali *mujbir* tersebut untuk melakukan perkawinan paksa serta memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menolak pengajuan perkawinan yang dilakukan oleh wali *mujbir*. (3) Formulasi hukum pencegahan perkawinan paksa melalui putusan tentang wali *mujbir* di peradilan agama relevan dengan: a. *Maqāṣid* Syariah (tujuan syariat Islam) terkait perlindungan jiwa (*hiḏ an-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hiḏ an-naṣl*); b. *Maqāṣid al-Uṣrah* (tujuan perkawinan); c. Perlindungan Perempuan dan Anak; d. Hak Asasi Manusia (HAM).

ABSTRACT

Ahmad Rasyidi Halim, SRN. 200311020081, *Forced Marriage Prevention Law Formulation through Religious Court*, First Adviser: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum., Second Adviser: Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., Dissertation, Doctoral Program in Sharia Studies, Postgraduate Program of UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Keywords: *Law Formulation, Prevention, Forced Marriage, Religious Court*

There are two main issues that are studied in this research. *Firstly*, it delves into sociological concerns surrounding forced and arranged marriages lacking a foundation of love, often leading to divorce proceedings in religious court. *Secondly*, it examines the legal aspects, particularly the absence of regulation regarding the jurisdiction of religious courts in addressing prevention of forced marriage through the decision of *wali mujbir* in religious court.

Based on that background, several research problems in this research are listed: (1) How is the law formula concept of the prevention of forced marriage through the decision of *wali mujbir* in religious court; (2) How is the law formula procedure in adjudicating the prevention of forced marriage through the decision of *wali mujbir* in religious court; (3) How is the relevance of forced marriage through religious court related to *maqâsid syariah, maqâsid al-usrah*, protection of women and children also human rights. The aim of this research is to answer several of those research problems.

This research is normative law research with two approaches, first is statute approach and the second is conceptual approach. This research is explained descriptively and analyzed deductively. The researched data is secondary data which consists of primer legal material and secondary legal material. Law theories that are used in this research include grand theory, middle theory and applied theory.

The result of this research: 1. This dissertation is intended to formulate the new law norm of the prevention of forced marriage that could be initialized by children or the guardian. New findings are found in this research in material law of the religious court law in the field of preventing marriage, so that religious court also have authority to handle the prevention of forced marriage issues. The Initiated concept is a formulated law of forced marriage in religious court through the authority expansion of religious court which at first was only authorized to handle the marriage prevention issue, so that the authority of religious court in Article 49 Letter a explanation of number 4 of the Religious Courts Law, expanded to have the authority to handle marriage prevention issues and forced marriage issues. The legal foundation of forced law marriage prevention through religious court refers to islamic law and national law definition. Next, the new law theory is initiated as a religious court accommodating law theory; (2) New findings are found in formal law through the initiation of examination development and the forced marriage prevention issue decision in religious court. The major step is by mediation

optimization that is done by the religious court mediator judge. And then, law expansion is initiated in the examination of forced marriage prevention issue in religious court by hearing the information from the Religious Affairs Office (KUA). The goal is to hear the information about the marriage rule and the forced marriage prevention and also to give formal information that there is a forced marriage attempt that is done by the parents or the guardians to the guardian children. In the decision that is initiated by the dictum that is constitutor characteristics (creating new laws) by enacting the parents or the guardians if they are proven forcing, then enacted as the *wali mujbir* that abusing *ijbār* right authority. Then, a dictum that has condemnatory characteristics is also initiated by prohibiting that *wali mujbir* to do forced marriage and also instruct the Religious Affairs Office (KUA) to reject the marriage submission that is done by *wali mujbir*. 3. Force marriage prevention law formulation through decision about *wali mujbir* in religious court is relevant with: a. *Maqāṣid Syariah* (the objective of Islamic syariah) related to the life protection (*ḥifẓ an-nafs*) and heredity protection (*ḥifẓ an-naṣl*); b. *Maqāṣid al-Usrah* (the objective of marriage); c. Women and Children Protection; d. Human Rights.

الملخص

أحمد راشدي حليم، ر. س. ج : ٢٠٠٨١.٢٠٠٣١١٠٢٠٠٨١، الصياغة القانونية لمنع الزواج القسري من خلال المحكمة الشرعية، المشرف الأول: الأستاذ الدكتور الحاج محمد فهمي الأمرزي، الماجستير، المشرف الثاني: الأستاذ الدكتور الحاج جلال الدين، الماجستير، رسالة الدكتوراه لبرنامج الدراسات العليا بجامعة أتناساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين عام ٢٠٢٤.

الكلمات المفتاحية: الصياغة القانونية، الوقاية، الزواج القسري، المحكمة الشرعية.

في هذا البحث تم الكشف عن مشكلتين رئيسيتين. أولهما، تتعلق المشاكل الاجتماعية بانتشار الزواج القسري والزواج من خلال الزيجات المدبرة دون أساس من الحب، مما أدى إلى ازدياد دعاوى الطلاق في المحكمة الشرعية. ثانيها، المشاكل القضائية المتعلقة بسلطة المحكمة الشرعية لم تنظم بعد حالات منع الزواج القسري من خلال القرارات المتعلقة بأولياء المجرمين في المحكمة الشرعية. انطلاقاً من هذه الخلفية، سيتم توضيح صياغة المشكلة في هذا البحث كما يلي: (١) ما مفهوم الصياغة القانونية لمنع الزواج القسري من خلال القرارات المتعلقة بأولياء المجرمين في المحكمة الشرعية؛ (٢) كيفية صياغة الإجراءات القانونية في فصل قضايا منع الزواج القسري من خلال القرارات المتعلقة بأولياء المجرمين في المحكمة الشرعية؛ (٣) ما هي أهمية منع الزواج القسري من خلال المحكمة الشرعية فيما يتعلق بمقاصد الشريعة ومقاصد الأسرة (قانون الأسرة)، وحماية المرأة والطفل، وحقوق الإنسان. والغرض من هذا البحث هو الإجابة على صياغات المشكلة أعلاه.

هذا البحث بحث قانوني معياري ذو منهجين هما: المنهج القانوني (النظام الأساسي) والمنهج المفاهيمي. يتم وصف البحث وصفيًا وتحليله استنتاجيًا. أما البيانات المدروسة في هذا البحث هي بيانات ثانوية تتكون من مواد قانونية أولية ومواد قانونية ثانوية. وتشمل النظريات القانونية المستخدمة في هذا البحث النظرية الكبرى (النظرية الكلية)، والنظرية الوسطى (النظرية المتوسطة)، والنظرية التطبيقية (النظرية الجزئية).

فكانت نتائج هذا البحث: (١) تهدف هذا البحث إلى صياغة قواعد قانونية جديدة فيما يتعلق بمنع الزواج القسري الذي يمكن أن يعانیه الأطفال أو الأطراف الخاضعة للوصاية. وفي هذا البحث تم التوصل إلى نتائج جديدة في القانون المادي لقانون المحكمة الشرعية في مجال منع الزواج، بحيث يكون للمحاكم الشرعية أيضاً صلاحية النظر في قضايا منع الزواج القسري. والمفهوم الذي تم طرحه هو صياغة قانونية لمنع الزواج القسري في المحكمة الشرعية من خلال توسيع سلطة المحكمة الشرعية من مجرد سلطة التعامل مع قضايا منع الزواج في البداية، بحيث تكون سلطة المحكمة الشرعية في المادة ٤٩ من الحروف (أ) رسالة شرح رقم ٤ من قانون المحكمة الشرعية لتشمل سلطة النظر في قضايا منع الزواج. التعامل مع حالات منع الزواج وحالات منع الزواج القسري. كما يشير الأساس القانوني لمنع الزواج القسري من خلال المحكمة الشرعية إلى أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوطني. وبعد ذلك، صدرت نظرية قانونية جديدة على شكل نظرية قانونية ملائمة للمحاكم الشرعية؛ (٢) تم التوصل إلى نتائج جديدة في القانون الرسمي من خلال فكرة تطوير الفحوصات والقرارات بشأن قضايا منع الزواج القسري في المحكمة الشرعية. وتتمثل الخطوة الرئيسية في تحسين الوساطة التي يقوم بها قضاة وسطاء المحكمة الشرعية. ثم كانت الفكرة هي تطوير القانون في دراسة حالات منع الزواج القسري في المحكمة الشرعية من خلال الاستماع إلى إفادات وبيانات مكتب الشؤون الدينية. والهدف من ذلك هو الاستماع إلى البيانات المتعلقة بأنظمة الزواج ومنع الزواج القسري، فضلاً عن تقديم معلومات رسمية عن وجود محاولات للزواج القسري من قبل أحد الوالدين أو الأوصياء على الأطفال أو الأطراف الخاضعة للوصاية. بعد ذلك، تمت صياغة وإصدار حكم تأسيسي في القرار (مما أدى إلى ظهور قانون جديد) من خلال تحديد أنه إذا ثبت أن أحد الوالدين أو الأوصياء قد قاموا بالإجبار، فسيتم تعيينهم كأوصياء مجبرين يسيئون استخدام سلطة حقوق الإجبار. كما صدر بعد ذلك أيضاً قرار له طابع الأمر (أمر بفعل شيء ما أو عدم القيام به) بمنع الولي المجبر من إجراء زيجات قسرية وأمر مكتب الشؤون الدينية برفض طلبات الزواج المقدمة من أولياء أمر المجبرين. (3) الصياغة القانونية لمنع الزواج القسري من خلال القرارات المتعلقة بأولياء المجبرين في المحكمة الشرعية تتعلق بما يلي: أ. مقاصد الشريعة (أهداف الشريعة الإسلامية) المتعلقة بحماية النفس (حفظ النفس) وحماية النسل (حفظ النسب)؛ ب. مقاصد الأسرة (الغرض من الزواج)؛ ج. حماية المرأة والطفل؛ د. حقوق الإنسان.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Salawat dan salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah mendekonstruksi ranah kehidupan menuju jalan yang terang benderang dengan segala kebenaran agama dan ilmu.

Disertasi ini berjudul: Formulasi Hukum Pencegahan Perkawinan Paksa melalui Peradilan Agama. Penelitian disertasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Doktor pada Program Studi S3 Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.

Dalam penelitian disertasi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang amat terpelajar dan terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin;
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Terima kasih banyak atas semua bimbingan, petunjuk dan bantuan beliau kepada penulis selama berlangsungnya proses akademik, demikian juga selama ujian disertasi hingga selesainya disertasi ini;

3. Bapak Mujiburohman, M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi S3 Ilmu Syariah dan Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi S3 Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Terima kasih banyak atas semua bimbingan, petunjuk dan bantuan beliau berdua kepada penulis selama penulis menyelesaikan proses akademik pada Program Studi S3 Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Demikian juga selama ujian disertasi hingga selesainya disertasi ini;
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum., selaku pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku pembimbing II. Semoga Allah Swt. melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas kesediaan beliau berdua yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis selama berlangsungnya proses akademik, demikian juga dalam penyusunan disertasi dan ujian disertasi hingga selesainya disertasi ini;
5. Bapak Prof. Alfitri, M.Ag., LL.M., Ph.D., selaku penguji eksternal. Terima kasih banyak atas semua bimbingan, petunjuk dan bantuan beliau kepada penulis dalam ujian disertasi hingga selesainya disertasi ini;
6. Bapak Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum., selaku penguji. Terima kasih banyak atas semua bimbingan, petunjuk dan bantuan beliau kepada penulis dalam ujian disertasi hingga selesainya disertasi ini;
7. Segenap dosen pengajar selama penulis menjalani proses akademik pada Program Studi S3 Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Atas sumbangsih ilmu dan pemikiran yang telah diajarkan kepada penulis, dihaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya;

8. Pimpinan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pimpinan dan Keluarga Besar Pengadilan Agama Banjarbaru. Terima kasih atas semua kebijakan, dukungan serta doa, khususnya dalam bentuk pemberian izin belajar kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses akademik Program Studi S3 Ilmu Syariah di UIN Antasari Banjarmasin;
9. Pimpinan serta segenap jajaran staf perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah meminjamkan buku-buku referensi kepada penulis;
10. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin, khususnya rekan-rekan angkatan tahun 2020. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama ini;
11. Penghormatan dan penghargaan yang tiada terhingga, penulis peruntukkan kepada Ayahnda (H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.) dan Ibunda (Hj. Nasimah, S.Pd.I.) serta Ayahnda Mertua (Drs. Buntoro Salindra alm.) dan Ibunda Mertua (Hj. Marzuqoh) yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada anaknda untuk menyelesaikan jenjang akademik akhir pada Program Studi S3 Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin;
12. Kepada istriku tercinta (Shenny Salindra, S.H., M.H.) dan anakku tersayang (Aghnia Humaira Halim). Terima kasih banyak dukungan dan doanya selama ini;
13. Terima kasih pula atas dukungan dan doa dari kakanda pertama beserta istri (H. Abdul Ghoni Hamid, S.H.I., M.H.I. dan Latipah, S.Pd.I.), kakanda kedua (Dr. H. Rahmat Hidayat, S.H.I, M.H.) dan adinda beserta istri (Ahmad Fauzan Arifin, Lc. dan Asmainnah, Lc.) serta semua keponakan tersayang.

Demikian pula kepada seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebut satu per satu. Terima kasih banyak atas doa baiknya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhirnya, atas segala ilmu, bimbingan serta bantuan semua pihak yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Swt. senantiasa memberkahi kehidupan kita dan semoga disertasi ini dapat bermanfaat. *Amin ya Rabb al-'Alamin.*

Banjarmasin, Februari 2024
Penulis,

Ahmad Rasyidi Halim

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka & ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qiu
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌َ---	Fathah	a	A
---◌ِ---	Kasrah	i	I
---◌ُ---	Dammah	u	Untuk

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ - ◌َ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ - ◌َ---	Fathah dan wau	Au	a dan untuk

Contoh :

كَتَبَ Kataba

فَعَلَ Fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
---◌َ ---◌َ---	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ - ◌ِ---	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و - ُ ---	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-----------	----------------	---	---------------------

Contoh :

قَالَ qāla

قِيلَ qīla

يَقُولُ yaqūlu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t (te).

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h (ha).

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta kedua kata itu terpisah maka ta tarbutah itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- raudah al-aṭfāl
- raudatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

- al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau berupa tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا rabbana

نَزَّلَ nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.
Contoh :

الرَّجُلُ ar-rajulu

الْقَلَمُ al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

أَمْرٌ umirtu

إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Fa aflu al-kaila wa al mīzān

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahua khair arraziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilama nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muḥammadun illā rasūl
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dilambangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an
نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Sumber:

SKB MENAG DAN MENDIKBUD REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 Th. 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987

DAFTAR NOMOR SURAT DALAM AL-QUR'AN

1. Al-Fātiḥah	39. Az-Zumar	77. Al-Mursalāt
2. Al-Baqarah	40. Al-Mu'min	78. An-Naba'
3. Āli-'Imrān	41. Fuṣṣilat	79. An-Nāzi'āt
4. An-Nisā'	42. As-Syu'arā	80. 'Abasa
5. Al-Mā'idah	43. Az-Zukhruf	81. At-Takwir
6. Al-An'am	44. Ad-Dukhān	82. Al-Infiṭār
7. Al-A'rāf	45. Al-Jāsiyah	83. Al-Muṭaffifin
8. Al-Anfāl	46. Al-Aḥqāf	84. Al-Insyiqāq
9. Al-Taubah	47. Muḥammad	85. Al-Burūj
10. Yūnus	48. Al-Fath	86. Aṭ-Ṭariq
11. Hūd	49. Al-Ḥujurāt	87. Al-A'lā
12. Yūsuf	50. Qāf	88. Al-Gāsiyah
13. Ar-Ra'd	51. Az-Zāriyat	89. Al-Fajr
14. Ibrāhīm	52. At-Ṭūr	90. Al-Balad
15. Al-Ḥijr	53. An-Najm	91. As-Syams
16. An-Nahl	54. Al-Qamar	92. Al-Lail
17. Al-Isra'	55. Ar-Raḥmān	93. Aḍ-Ḍuhā
18. Al-Kahfi	56. Al-Wāqi'ah	94. Al-Insyirāh
19. Maryam	57. Al-Ḥadīd	95. At-Tin
20. Ṭhā	58. Al-Mujādilah	96. Al-'Alaq
21. Al-Anbiyā	59. Al-Hasyr	97. Al-Qadr
22. Al-Hajj	60. Al-Mumtaḥanah	98. Al-Bayyinah
23. Al-Mu'minūn	61. Aṣ-Ṣāff	99. Al-Zalzalah
24. An-Nūr	62. Al-Jumu'ah	100. Al-'Adiyat
25. Al-Furqān	63. Al-Munāfiqūn	101. Al-Qāri'ah
26. As-Syu'arā	64. At-Tagābun	102. At-Takāsur
27. An-Naml	65. Aṭ-Ṭalāq	103. Al-'Aṣr
28. Al-Qaṣaṣ	66. At-Taḥrim	104. Al-Humazah
29. Al-Ankabūt	67. Al-Mulk	105. Al-Fil
30. Ar-Rūm	68. Al-Qalam	106. Quraysy
31. Lūqman	69. Al-Ḥāqqah	107. Al-Mā'un
32. As-Sajadah	70. Al-Ma'ārij	108. Al-Kauṣar
33. Al-Ahzāb	71. Nūh	109. Al-Kāfirūn
34. Saba'	72. Al-Jin	110. An-Naṣr
35. Fāṭir	73. Al-Muzzammil	111. Al-Lahab
36. Yāsin	74. Al-Muddaṣsir	112. Al-Ikhlāṣ
37. Aṣ-Ṣāffāt	75. Al-Qiyāmah	113. Al-Falaq
38. Ṣād	76. Al-Insān	114. An-Nās

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN DISERTASI.....	iii
PENGESAHAN DISERTASI.....	iv
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	v
ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....	vii
ABSTRAK BAHASA ARAB.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN.....	xv
DAFTAR NOMOR SURAT DALAM AL-QUR'AN.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxv
DAFTAR BAGAN.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Signifikasi Penelitian.....	16
E. Definisi Istilah.....	18
F. Penelitian Terdahulu.....	24
G. Kajian Teori.....	28
H. Metode Penelitian.....	45
I. Sistematika Penulisan.....	53
BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG WALI <i>MUJBIR</i>, PERKAWINAN PAKSA, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SERTA HAK ASASI MANUSIA	
A. Tinjauan Hukum tentang Wali <i>Mujbir</i>	
1. Definisi Wali <i>Mujbir</i>	56
2. Dasar Hukum Wali <i>Mujbir</i>	60
3. Kedudukan Wali <i>Mujbir</i> dan Syarat Penggunaan Hak <i>Ijbār</i>	63
4. Ragam Pandangan Ulama Fikih tentang Wali <i>Mujbir</i>	66
5. Kategori Wali <i>Mujbir</i> dalam Perkawinan.....	70
a. Wali <i>Mujbir</i> yang sesuai dengan Syariat Islam.....	70
b. Wali <i>Mujbir</i> yang Bertentangan dengan Syariat Islam	74
B. Tinjauan Hukum tentang Perkawinan Paksa	
1. Definisi Perkawinan Paksa.....	76
2. Konstruksi <i>Socio-Legal</i> Terjadinya Perkawinan Paksa di Indonesia.....	77
3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Paksa .	80
a. Faktor Dominasi Orang Tua/Wali.....	81

b.	Faktor Adat atau Kebiasaan	82
c.	Faktor Sosial dan Lingkungan	84
d.	Faktor Keturunan	84
e.	Faktor Kurangnya Pemahaman Hukum	86
f.	Faktor Ekonomi.....	88
g.	Faktor Pendidikan	89
4.	Akibat Hukum Perkawinan Paksa	
a.	Terjadinya Ketidakharmisan Rumah Tangga.....	90
b.	Terjadinya Penceraian.....	90
5.	Perkawinan Paksa dalam Tinjauan Hukum Positif	92
C.	Tinjauan Hukum tentang Perlindungan Perempuan	
1.	Perlindungan Perempuan dalam Konteks Hukum	96
2.	Ketentuan Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) ...	98
3.	Implementasi Hak-Hak Perempuan	106
D.	Tinjauan Hukum tentang Perlindungan Anak	
1.	Definisi Perlindungan Anak dan Latar Belakang Perlindungan Anak.....	111
2.	Asas-asas Perlindungan Anak	119
3.	Konvensi Hak Anak	124
4.	Ketentuan Hukum Undang-Undang Perlindungan Anak.	128
E.	Tinjauan Hukum tentang Hak Asasi Manusia	
1.	Konsepsi Hak Asasi Manusia.....	136
2.	Perlindungan Hukum dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM)	138
3.	Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam.....	140
4.	Harmonisasi Konsep HAM Perspektif Barat dan Islam .	144
BAB III KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM PENANGANAN PERKARA PENCEGAHAN PERKAWINAN DI INDONESIA		
A.	Definisi Pengadilan Agama dan Peradilan Agama	148
B.	Kedudukan dan Dasar Hukum Peradilan Agama di Indonesia.	150
C.	Asas-Asas Hukum di Peradilan Agama	153
D.	Sumber Hukum Materiil dan Formil Peradilan Agama	165
1.	Sumber Hukum Formil	165
2.	Sumber Hukum Materiil	173
E.	Kewenangan Peradilan Agama dalam Penanganan Perkara Pencegahan Perkawinan di Indonesia	181
1.	Kewenangan Absolut dan Relatif Peradilan Agama.....	181
2.	Kewenangan Peradilan Agama dalam Penanganan Perkara Pencegahan Perkawinan di Indonesia.....	196
F.	Tinjauan mengenai Kekosongan Hukum Bidang Perdata dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Paksa di Indonesia...	202

BAB IV FORMULASI HUKUM PENCEGAHAN PERKAWINAN
PAKSA MELALUI PERADILAN AGAMA SERTA GAGASAN
PROSEDUR DAN RELEVANSI HUKUMNYA

A. Formulasi Hukum Pencegahan Perkawinan Paksa melalui Peradilan Agama	
1. Problematika Wali <i>Mujbir</i> dan Perkawinan Paksa.....	206
2. Indikator Perkawinan Paksa.....	212
3. Tinjauan Hukum mengenai Pencegahan Perkawinan Paksa di Berbagai Negara	214
a. Malaysia	214
b. Maroko	215
c. Mesir	216
d. Pakistan	217
e. Tunisia.....	218
f. Australia	219
4. Langkah-langkah dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Paksa di Indonesia	
a. Jalur Non Litigasi (Non Peradilan)	221
1) Penyuluhan Kantor Urusan Agama (KUA) serta Prosedur Keberatan Nikah oleh Pihak Terkait....	221
2) Penyuluhan Dinas Sosial.....	225
3) Penyuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	226
4) Penyuluhan Psikolog dan Lembaga Masyarakat	229
b. Jalur Litigasi (Peradilan)	230
1) Hukum Pidana.....	230
2) Hukum Perdata.....	232
5. Beberapa Contoh Kasus Hukum di Pengadilan Agama Terkait Perceraian disebabkan Perkawinan Paksa	235
6. Perluasan Kewenangan Peradilan Agama melalui Formula Penanganan Perkara Pencegahan Perkawinan Paksa.....	238
7. Konstruksi Landasan Hukum Pencegahan Perkawinan Paksa melalui Putusan tentang Wali <i>Mujbir</i> di Peradilan Agama	255
8. Gagasan Teori Hukum Akomodatif di Peradilan Agama.	263
B. Formulasi Prosedur Hukum dalam Mengadili Perkara Pencegahan Perkawinan Paksa melalui Peradilan Agama	
1. Optimalisasi Mediasi dalam Penanganan Perkara Pencegahan Perkawinan Paksa melalui Peradilan Agama.	269
2. Gagasan Pembaruan Prosedur Pemeriksaan Perkara Pencegahan Perkawinan Paksa dengan Mendengar Keterangan Pihak Kantor Urusan Agama	276
3. Gagasan Pembaruan Putusan tentang Wali <i>Mujbir</i> di Peradilan Agama yang bersifat <i>Konstitutor</i> dan <i>Komdemnator</i>	285

4. Aspek Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Pencegahan Perkawinan Paksa melalui Putusan tentang Wali <i>Mujbir</i> di Peradilan Agama	297
5. Pengembangan Hukum Materiil dan Formil Pencegahan Perkawinan Paksa melalui Peradilan Agama.....	302
C. Relevansi Pencegahan Perkawinan Paksa melalui Peradilan Agama berkaitan dengan <i>Maqāṣid</i> Syariah, <i>Maqāṣid al-Ushrah</i> , Perlindungan Perempuan dan Anak serta Hak Asasi Manusia	
1. Relevansi terkait <i>Maqāṣid</i> Syariah.....	305
a. Perlindungan Jiwa (<i>Hifz an-Nafs</i>)	311
b. Perlindungan Keturunan (<i>Hifz an-Nasl</i>).....	314
2. Relevansi terkait <i>Maqāṣid al-Ushrah</i>	316
3. Relevansi terkait Perlindungan Perempuan dan Anak.	320
4. Relevansi terkait Hak Asasi Manusia	325
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	338
B. Rekomendasi.....	340

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Tabel Perkara Perceraian karena Perkawinan Paksa dan Perjudohan di Pengadilan Agama seluruh Indonesia Tahun 2020 dan 2021	8
Tabel 2 : Tabel Perkara Perceraian karena Perkawinan Paksa dan Perjudohan di Pengadilan Agama seluruh Indonesia Tahun 2020 dan 2021	238
Tabel 3 : Tabel Formulasi Hukum Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.....	252

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Gambar 1 : Bagan Konstruksi Landasan Hukum Pencegahan Perkawinan Paksa di Peradilan Agama	263
Gambar 2 : Bagan Teori Hukum Akomodatif di Peradilan Agama	266
Gambar 3 : Skema Alur Penanganan Perkara Pencegahan Perkawinan Paksa di Peradilan Agama	295
Gambar 4 : Bagan Aspek Hukum Pencegahan Perkawinan Paksa di Peradilan Agama	302
Gambar 5 : Bagan Pembaruan Prosedur Hukum Formil di Peradilan Agama.....	304
Gambar 6 : Bagan <i>Novelty</i> (Temuan Baru) Disertasi	337